

**Peranan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017**

**Devi Harahap  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (025) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)  
[DeviHarahapp@gmail.com](mailto:DeviHarahapp@gmail.com)  
[nhsardini@gmail.com](mailto:nhsardini@gmail.com)

**ABSTRACT**

Kelompok kepentingan merupakan salah satu aktor non formal yang turut memiliki pengaruh untuk berperan aktif dalam dinamika politik lokal dengan berbagai upaya dan strategi yang mereka lakukan. Kehadiran ormas tersebut tentunya menimbulkan suatu dinamika baru pada tataran sosial dan politik. Basis massa yang merupakan sumber kekuatan ormas dalam bergerak, menjadikan ormas sebuah komoditi baru di dalam dunia politik praktis. Penelitian ini mengambil fokus kepada Front Pembela Islam (FPI) sebagai salah satu ormas Islam. Pembahasan pada penelitian ini berusaha mengungkapkan seberapa besar peranan FPI terhadap dinamika politik yang terjadi pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan faktor penyebab FPI turut berperan aktif dalam dinamika tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dapat berupa kata-kata, gambar, kutipan-kutipan hasil wawancara dan dokumen resmi yang mendukung penelitian ini.

Kata Kunci : FPI, Kelompok Kepentingan, Al-Maidah 51, Aksi Bela Islam

**PENDAHULUAN**

Perkembangan sejarah gerakan Islam di Indonesia yang akhir-akhir ini dimarakkan dengan bangkitnya gerakan Islam radikal-fundamentalis telah menarik perhatian masyarakat luas. Gerakan tersebut dibedakan menjadi dua aspek. Pertama, semangat pemurnian agama yang dilakukan oleh

gerakan pembaru Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persatuan Islam untuk menghilangkan *khurafât dan takhayul*.<sup>1</sup> Kedua,

---

<sup>1</sup> Khurâfat secara bahasa berarti takhayul yaitu semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang-larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Lihat

mempertahankan tradisi bermazhab terutama dalam bidang fiqih yang dilakukan oleh gerakan tradisional Nahdatul Ulama dan *Al-Washliyah*.

Gerakan inilah yang mendorong munculnya gerakan-gerakan pasca-tradisional yang lebih dikenal dengan gerakan Islam kontemporer.<sup>2</sup> Hal ini terlihat dengan tumbuhnya proses demokratisasi yang menghadirkan *Interest Group* (kelompok kepentingan) dengan latar belakang gerakan Islamisme. Pada perkembangannya, organisasi Islam dan maraknya gerakan Islamini pun memiliki pengaruh yang cukup diperhitungkan, terutama dalam momen-momen politik seperti dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) karena organisasi masyarakat Islam mempunyai basis masyarakat dan struktur yang jelas sehingga dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, cenderung mudah

diarahkan dan kerap dijadikan sebagai komoditi politik oleh calon pemimpin dan partai politik yang berkepentingan untuk menghimpun masyarakat dalam masa kampanye, pengamanan, hingga masa pencoblosan.

DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengadakan Pilkada serentak Tahun 2017 dan diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dengan nomor urut 1, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dengan nomor urut 2, dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno dengan nomor urut 3. Pilkada DKI Jakarta 2017 digelar dua putaran karena saat putaran pertama tidak memunculkan satu pasangan kandidat yang memperoleh suara mayoritas mutlak (50% + 1). dengan perolehan suara sebagai berikut : Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., MA dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. (17.06%), Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M. dan Drs. H.Djarot Hidayat, M.Si. (42.96%), Anies Baswedan, Ph.D dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA.

---

Rogayah Binti Check, *Doktrin Khurafat, Pemahaman Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadith*, (Malaysia: Universitas Malaya, 2016), Hal.20

<sup>2</sup> Imam Tholkhah, Abdul Azis, dan Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), Hal.8

(39.97%).<sup>3</sup> Maka dilanjutkan pada putaran kedua dengan perolehan suara Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M. dan Drs. H.Djarot Hidayat, M.Si. (42.05%) dan Anies Baswedan, Ph.D dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. (57.95%).<sup>4</sup> Sehingga dinyatakan bahwa pasangan Anies-Sandi menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Pilkada DKI Jakarta 2017 khususnya pada putaran kedua menyajikan fenomena menguatnya isu berdasar identitas politik dari masing-masing pasangan calon yang cukup sensitif dalam sejarah politik Indonesia. Tak ayal salah satu pemicu munculnya politik identitas dengan berbagai konflik yang mengiringi proses Pilkada diawali dengan munculnya pernyataan kontroversial Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016. Kasus dugaan penodaan agama terhadap Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ahok juga

menimbulkan respon beragam di kalangan berbagai elemen dan komponen umat Islam, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif; diekspresikan secara terbuka maupun tersembunyi. Suara terbuka dalam kasus tersebut dilakukan dengan maraknya demonstrasi atas nama pembelaan terhadap ayat suci Al-Qur'an yang dikenal dengan Aksi Bela Islam berjilid, jilid 1 (1410), jilid 2 (411), jilid 3 (212), jilid 4 (112), dan jilid 5 (212), jilid 6 (313), dan jilid 7 (55) sehingga membuat arus aktifisme Islam menjadi salah satu gelombang utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada Pilkada.<sup>5</sup>

Salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang terlibat dalam dinamika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah FPI (Front Pembela Islam) yang merupakan sebuah Ormas di Indonesia yang berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum syari'ah Islam di negara sekuler dan gerakan aktivitas dakwah FPI memfokuskan diri pada masalah *amar ma'ruf nahi*

---

<sup>3</sup> Keputusan KPU DKI Jakarta No.162/KPU-Prov-010/II/2017

<sup>4</sup> Keputusan KPU DKI Jakarta No.87/Kpts/KPU-Prov-010/2017

---

<sup>5</sup> Achmad Fachrudin, *Tantangan Demokrasi Elektoral Dari Oligarki Politik Hingga Politik Identitas*, (Jakarta, Pustaka Imtak 2017), Hal.273-274

*munkar*<sup>6</sup> hingga syariat Islam dengan cara turun mimbar.

Rangkaian Aksi Bela Islam khususnya Aksi Bela Islam 411 (jilid ke-2) dan 212 (Jilid ke-3) merupakan gerakan sosial baru berbasis religiusitas, bahwa nilai-nilai religius Islam yang diyakini jutaan manusia di Indonesia telah mampu mendorong sebuah gerakan sosial besar untuk menyuarkan tuntutananya kepada negara yaitu “Penjarakan Ahok” yang diyakini telah menistakan Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam. Rangkaian

Aksi Bela Islam pada saat proses Pilkada DKI Jakarta sedang berlangsung tersebut juga memberikan gambaran atas kelompok Islam populis yang tergabung dalam beberapa kelompok di Jakarta, yang terdiri atas grup-grupkelas religius menengah ke atas maupun ke bawah, beberapa elit pemuka agama, tokoh politik dan bisnis. Selain itu, figur Rizieq Shihab sebagai pimpinan FPI mulai diakui sebagai pimpinan gerakan umat Islam populis. Tulisan ini kemudian hendak mengkaji peranan Front Pembela Islam

(FPI) dan faktor-faktor yang menguatkan peranan FPI pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dapat berupa kata-kata, gambar, kutipan-kutipan hasil wawancara dan dokumen resmi yang mendukung penelitian ini. Dimana informasi dan data didapatkan dengan teknik berupa wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

## **HASIL PENELITIAN**

Bangkitnya arus aktivisme gerakan Islam pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 salah satunya dimotori oleh para pimpinan FPI terdiri dari Habaib dan Alim Ulama. Habib Rizieq Syihab sebagai tokoh sentral populis yang merupakan pencetus ide untuk menggelar Aksi Bela Islam berjilid telah membuktikan bahwa gerakan ormas dalam Pilkada dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pemilih psikologis untuk pasangan calon yang didukungnya (dalam hal ini adalah calon pasangan gubernur

---

<sup>6</sup> DPP FPI, *Risalah Historis dan Garis Perjuangan FPI* (t.t : t.p,.t.th.), Hal.89

muslim). Gerakan Aksi Bela Islam berjilid tersebut dilakukan kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dengan nuansa religiusitas, membawa identitas Islam, dan berdemonstrasi ke jalan menuntut penegakkan hukum terhadap dugaan kasus penistaan yang dilakukan oleh Ahok, hingga akhirnya isu Politik Identitas/SARA terutama sentimen agama menjadi fenomena yang menyelimuti proses Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

FPI memiliki struktur berupa organisasi sayap juang dan badan organisasi yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap dewan pimpinan pusat. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, DPP FPI bersama seluruh elemen organisasi di dalamnya bekerja sama mensukseskan Pilkada dan memenangkan pasangan calon gubernur muslim.

Sebagai ormas Islam yang berpusat di ibu kota, FPI secara keseluruhan dan totalitas terjun ke lapangan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat muslim dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ke 44 kecamatan di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan oleh FPI secara rutin bergotong royong bersama

para habaib, alim ulama, pengurus dan anggota baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan dalam rangka memenangkan calon gubernur muslim untuk memimpin masyarakat DKI Jakarta yang mayoritas beragama Islam. Tema memilih pemimpin muslim menjadi pembicaraan yang selalu disampaikan oleh para mubaligh FPI pada setiap penyelenggaraan tabligh akbar. Sebagai ormas islam, FPI merasa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut memberikan pencerdasan mengenai wawasan politik dan wawasan beragama.

Pada Pilkada DKI Jakarta putaran satu, FPI memiliki sikap untuk mendukung kedua pasangan calon muslim yaitu Agus-Silvi dan Anies-Sandi namun tidak menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi mengenai strategi kemenangan apapun dengan tim sukses dari kedua pasangan calon muslim tersebut, melainkan hanya fokus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar memilih gubernur muslim.

Melihat hasil perolehan suara Ahok-Djarot lebih mengungguli suara Anies-Sandi pada putaran pertama,

maka FPI melanjutkan strategi pemberian pendidikan politik kepada masyarakat melalui dakwah dalam bentuk gerakan sholat subuh berjamaah di berbagai titik lokasi kecamatan bertanda merah yang merupakan titik-titik dimana perolehan suara pasangan Anies-Sandi lebih kecil dari pasangan Ahok-Djarot.

Pada hari Kamis, 25 Februari 2016 lalu FPI menjadi perhatian media massa atas penyelenggaraan sebuah kegiatan bertajuk Konvensi Calon Gubernur Muslim Jakarta yang diikuti oleh para ulama, habaib, dan tokoh yang difasilitasi oleh Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah. Tujuan dan semangat yang ingin dicapai oleh FPI selaku salah satu ormas Islam yang menginisiasi konvensi ini adalah untuk menghadapi para calon gubernur beserta wakilnya yang akan berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, khususnya untuk menghadang dan berlaga *head to head* melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang beragama non-Islam untuk maju kembali pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Selain itu, FPI juga melakukan peangawalan pemungutan suara di TPS

dengan menggelar Gerakan Tamasya Al-Maidah. Gerakan tersebut adalah sebuah kegiatan yang diinisiasikan oleh ormas-ormas Islam termasuk FPI yang tergabung dalam GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) untuk mengawal jalannya pemungutan suara pada hari pencoblosan tanggal 19 April 2017 di berbagai TPS agar dapat mengantisipasi adanya tindak kecurangan dan intimidasi pemilih serta terlaksananya Pilkada yang damai.

Aksi Damai Bela Islam merupakan peristiwa sejarah besar bagi Ummat Islam dan bangsa Indonesia, aksi tersebut terjadi hingga 7 jilid yang menggambarkan Ukhuwah Islamiyah yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Jakarta sebagai titik utama terlaksananya aksi karena negara tidak segera merespon dengan sigap atas kasus yang dilakukan oleh Ahok yang dianggap menistakan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan kajian mengenai kontroversi pernyataan Ahok mengenai surat Al-Maidah yang akhirnya mengeluarkan keputusan berupa fatwa MUI bahwa pernyataan Ahok merupakan sebuah penistaan agama yang berpotensi memasuki ranah tindak pidana.

FPI memiliki peranan dalam mengkapitalisasi keadaan-keadaan eksternal yang berasal dari masyarakat hingga menjadikan setiap kegiatan khususnya Aksi Bela Islam menjadi suatu hal yang terstruktur dengan membawa sentimen agama yang berpacu pada surat Al-Maidah ayat 51. Dari hasil wawancara dengan Pengurus DPP FPI dapat dilihat bahwa Aksi Bela Islam yang berlangsung memiliki makna bagi perjuangan FPI selaku ormas Islam untuk membela Al-Qur'an hingga menegakkan syariat Islam berakhir dengan memenangkan gubernur muslim pada Pilkada DKI Jakarta.

Faktor umum penguat peranan FPI dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah Platform (landasan) FPI berupa Asas Islam ala *ahlussunnah wal jamaah* (aswaja). Dalam pandangan FPI Aswaja dimaknai dengan berpegang pada kebenaran yang pasti sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dan mereka itu para sahabat dan tabi'in

Berbagai pernyataan dan sikap FPI yang selalu keras dan tanpa kompromi dengan mengedepankan syariat Islam dalam menangani suatu

masalah baik agama, sosial, maupun politik membuat posisi FPI resisten terhadap kultur masyarakat Islam Indonesia.

Secara umum ada beberapa poin yang menjadi penekanan dalam mewujudkan NKRI yang sesuai dengan Al-Quran tersebut.. Rizieq menyebut bahwa NKRI bersyariah adalah NKRI yang beragama, bukan atheis atau komunis yang tanpa agama. Ia juga menjelaskan bahwa NKRI bersyariah adalah NKRI yang menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing. Masih soal agama, ada point yang menjadi inti dari konsep tersebut, yaitu bahwa NKRI yang sesuai syariah adalah NKRI yang melindungi semua agama dari penistaan dan penodaan serta pelecehan. *Platform* yang ada menjadi ukuran dan indikator pergerakan FPI dalam melakukan peranan dan sekaligus menjadi faktor dalam bergerak. Landasan FPI yang menjadi faktor FPI berperan dalam Pilkada DKI dibagi menjadi 3 hal yaitu NKRI Bersyariah, Amar Ma;ruf Nahi Munkar, dan Asas Representatif (Keseimbangan).

Sejak Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, khususnya pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat FPI harus melakukan manuver dengan mengubah gaya dan model dakwah lamanya. Aksi *sweeping* yang kerap dilakukan terhadap kelompok minoritas dan tempat-tempat maksiat oleh FPI tidak lagi menjadi arah dan gerak perjuangan FPI, hal ini ditunjukkan ketika FPI secara ikhtiar terlibat dalam rangkaian Politik lokal pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. FPI menyadari model dakwah yang selama ini mereka jalankan nampaknya kurang begitu sukses untuk mencapai keberhasilan tujuan mereka karena FPI kerap bersinggungan dan kontra dengan penguasa baik kepada Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta maupun Joko Widodo Presiden Indonesia.

Keterlibatan FPI dalam Pilkada DKI mampu membuat nama Rizieq Shihab dan ormas FPI sempat dielukan dan dijadikan tumpuan oleh masyarakat yang anti terhadap Ahok. Popularitas FPI meningkat drastis dan secara langsung Rizieq Shihab menjadi ikon dari imam besar umat Islam dalam memperjuangkan suara masyarakat muslim. Banyak media lokal, nasional

bahkan internasional yang kerap memberitakan FPI selama rangkaian Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Keterlibatan FPI dalam Pilkada DKI juga memberikan bonus besar untuk Anies selaku calon gubernur beragama Islam yang masuk pada putaran kedua, hal ini sejalan dengan tujuan FPI ikut terlibat dalam Pilkada DKI yaitu menghadirkan gubernur muslim untuk masyarakat Jakarta.

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja Ahok yang mencapai 75% membuat FPI berhati-hati dalam bergerak dan melakukan startegi untuk mencegal Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur konstitusi.

Bagi FPI Amar ma'ruf nahi munkar akan terjadi jika sosok pemimpin yang membuat dan menjalankan kebijakan mengerti akan nilai-nilai syariat Islam. Alasan dasar agama menjadi sebab mengapa kebijakan Ahok dinilai oleh FPI tidak pro dengan umat muslim sehingga kerap kali mendiskriminasi dan merugikan umat Islam. Berikut adalah kebijakan-kebijakan kontroversi Ahok :

1. Kebijakan Larangan Takbir Keliling



2. Kebijakan Peredaran Minuman Keras (Miras)
3. Kebijakan Pembongkaran Masjid
4. Kebijakan Larangan Penjualan Hewan di Sembarang Tempat
5. Kebijakan Larangan Pengajian/ Tabligh Akbar di Kawasan Monas

Selain itu resistensi terhadap Ahok terformulasikan ke dalam persepsi di benak kelompok lainnya bahwa cara dan gaya komunikasi Ahok sudah melewati batas-batas seorang pemimpin yang *arrogant*, kasar, dan cenderung otoriter.

## **PENUTUP**

Bentuk peranan FPI berupa kegiatan terlihat ketika FPI melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik, mengawal jalannya pemungutan suara di TPS, hingga menyelenggarakan aksi demonstrasi turun ke jalan bersama umat Islam untuk menuntut keadilan hukum atas kasus dugaan penistaan agama mengenai Surat Al-Maidah 51 yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/BTP) sebagai calon gubernur yang belaga dalam Pilkada.

Faktor yang menyebabkan FPI turut berperan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah landasan

(*flatrorm*) atau ideologi FPI yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yaitu Ahlusunna Wal Jama'ah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Hal ini menjadi dasar dari perjuangan FPI dalam bergerak melalui dakwah maupun aksi untuk menuju NKRI Bersyariah, namun tujuan FPI tersebut tidak akan tercapai jika sosok pemimpin yang menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta sebagai penentu arah kebijakan dan pembuat peraturan bukan berlatar belakang muslim. FPI yang kerap kontra dengan Ahok menjadi titik awal pertarungan antara FPI dengan Ahok dan hal ini berlanjut hingga kepada kontestasi Pilkada.

## **SIMPULAN**

Sebagai ormas Islam, FPI diharapkan mampu menjadi motor dalam proses demokratisasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara murni dan tidak hanya menjadi komoditas politik saja. Kendati demikian, dalam upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat muslim dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dari segi internal FPI perlu adanya penguatan

akan pemahaman berpolitik yang mengedepankan etika. Terutama ketika membawa identitas kelompok berupa agama ke dalam suatu ranah kontestasi politik yang merupakan lahan akan perhatian publik sehingga tidak akan menyulut konflik berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta diharapkan agenda politik lokal DKI Jakarta yang menjadi etalase perpolitikan nasional dapat berjalan lebih kondusif dan terjadi pendewasaan masyarakat Jakarta dalam berdemokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdilah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis "Pergulatan Tanda Tanpa Identitas"*. Magelang: Indonesiatara.
- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Almond, G. (1974). *Comparative Politic Today; A World's View*. Boston: Little Brown & Company
- Arikunto, Suhersimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Menuju Politik Identitas*. (M. Dr. Arry Bainus, Ed.) Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cholisin, dkk. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Deliar Noer. (1980). *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- DPP FPI. t.t *Risalah Historis dan Garis Perjuangan FPI*
- Fachrudin, Achmad. (2017). *Tantangan Demokrasi Elektoral Dari Oligarki Politik Hingga Politik Identitas*, Jakarta : Pustaka Imtak.
- Fransisco Panizza. (2005). *Populism and The Mirror of Democracy*, Verso, London.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Laclau, E. (2005). *On populist reason*. London: Verso
- Mudde, Cas. (2007). *Populist Radical Right Parties in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shihab, Muhammad Rizieq. (2004), *Dialog FPI : Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah.
- Winarto, Budi. (2007). *Sistem Politik Indonesia era reformasi*. Jakarta: PT Buku Kita.